

Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri

¹Nur Faidati, ²Nur Fitri Muthmainah

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Aisyiyah Yogyakarta
e-mail : ¹nurfaidati18@gmail.com, ²nurfitri.mutmainah@gmail.com

Abstrak

Studi ini bermaksud mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY. Dalam konteks penelitian ini untuk membantu mengembangkan pelaku UMKM di DIY dalam proses adaptasi dan mempercepat kesiapan pelaku UMKM merespon revolusi industri 4.0 perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, korporasi maupun civil society. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Siapa saja aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam membantu proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0 DIY?. Untuk tujuan tersebut, dilakukan penelitian studi kasus intrinsik dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari masing-masing stakeholder. Collaborative Governance Process dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 belum optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, UMKM, Revolusi Industri

Collaborative Governance in the Development of MSMEs in the Industrial Revolution Era

Abstract

This study intends to examine the scope of collaboration in strengthening the position of small and medium businesses in facing the 4.0 industrial revolution in the DIY region. In the context of this research to help develop MSME actors in DIY in the process of adaptation and accelerate the readiness of MSME actors to respond to the industrial revolution 4.0, it needs to be done jointly between government, corporations and civil society. The formulation of the problem of this research is Who are the actors involved in collaboration in assisting the adaptation process of MSME actors facing the DIY industrial revolution era?

To this end, intrinsic case study research is carried out using a qualitative approach. The data collection techniques used in this study are literature studies and interviews. Collaboration formed in this context is realized by organizing a number of activities from each stakeholder. The Collaborative Governance Process in the development of MSMEs in DIY in the era of the industrial revolution 4.0 has not been optimally implemented, because there are still overlapping programs and target groups.

Keywords : *Collaborative Governance*, UMKM, Industrial Revolution

A. PENDAHULUAN

Studi ini bermaksud mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY. Sampai saat ini UMKM masih menjadi penopang utama dari perekonomian Yogyakarta. Data tahun 2017 menunjukkan

bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Yogyakarta mencapai 98,4 persen. Sementara itu UMKM mampu menyerap 79 persen dari total lapangan kerja (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, 2018). Capaian ini didukung oleh pelaku usaha yang berjumlah 248.217 unit usaha. Di era revolusi industri 4.0, UMKM menghadapi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

tantangan berat berupa kemampuannya beradaptasi atau setidaknya bertahan.

Berbicara mengenai penggunaan teknologi robot yang menggantikan tenaga manusia, di Indonesia dirasa sedikit yang menggunakannya. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diselenggarakan tahun 2016 menunjukkan, data pengguna internet di Indonesia diketahui mencapai 13,27 jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta orang. Dari 57,9 juta UKM di Indonesia baru 9 persen yang menggunakan internet secara serius untuk menjual produknya, 37 % menggunakan internet tingkat dasar dan 36 % sama sekali belum menyentuh internet (Kementrian Perindustrian, 2017).

Gambaran penggunaan internet di Yogyakarta secara umum kurang lebih sama dengan potret nasional. Data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 30% dari total pelaku UMKM di Yogyakarta pada tahun 2017 sudah memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya. Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang cukup berat untuk membantu sisa pelaku UMKM yang 70% tersebut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Inilah pokok penting permasalahan yang harus dituntaskan agar pelaku UMKM di Yogyakarta setidaknya bisa memanfaatkan teknologi internet maupun ponsel pintar untuk berbisnis. UKM dan pemerintah perlu bersinergi di mana nantinya UKM ini dapat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkan pemerintah atau stakeholder lain agar minimal agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan sarana dalam penggunaan internet dan ponsel pintar dalam pengembangan usahanya.

Lalu bagaimana peran stakeholder, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan pencerdasan atau fasilitas berbasis kemajuan teknologi bagi UKM dalam menghadapi revolusi industri generasi ke empat ini?. Bagaimana peluang dilakukannya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam membantu proses adaptasi dan percepatan kesiapan pelaku UMKM ini dalam merespon revolusi industri 4.0?.

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (Haryono, N., 2012:48). Dalam konteks tersebut proses menyiapkan pelaku UMKM untuk mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 ini dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, korporasi maupun asosiasi-asosiasi terkait, seperti komunitas digital marketer dan asosiasi bisnis. Konsep kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik ini lebih dikenal dengan istilah collaborative governance. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka studi ini akan difokuskan pada pada peran yang dijalankan oleh para kolaborator (Pemerintah, masyarakat dan swasta) untuk membantu proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0, khususnya di Provinsi DIY.

Studi yang mengkaji secara spesifik terkait kolaboratif governance dalam menyelesaikan permasalahan publik telah banyak dilakukan. Diantara studi tersebut adalah Dimas Denny Irawan (2017). Denny Irawan telah melakukan kajian terkait kolaboratif governance dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi penyebab gagalnya kolaborasi antar stakeholder di Kota Surabaya dalam mengendalikan pencemaran udara yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence, dan planning collaborative actions belum berjalan. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria distributive accountability dan access to resources pada tahap debating strategies for influence. Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan stakeholders lain di dalam forum kolaborasi. Secara keseluruhan, pada ketiga tahapan dari proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya hanya satu kriteria yang telah terpenuhi yaitu trust among the participants.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Penelitian yang lain dilakukan oleh Ratna Trisuma Dewi (2012). Ratna Trisuma Dewi melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kolaboratif governance dalam pengembangan industri kecil di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan industri kecil kerajinan reyog dan pertunjukkan reyog dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat collaborative governance dalam pengembangan industri kecil kerajinan reyog dan pertunjukkan reyog.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Bank Jatim, Yayasan Reyog, pengrajin, seniman dan pemasok dilakukan dalam hal penyediaan modal usaha. Namun sayangnya penyediaan modal usaha tersebut tidak berjalan baik. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya komitmen dari pemerintah dan keterbatasan informasi yang diperoleh pengrajin. Pengrajin tidak memperoleh informasi mengenai bahan baku pembuatan reyog.

Studi lain terkait kolaboratif governance dilakukan juga oleh Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko dan Moh. Imron (2017). Kurniasih, Setyoko dan Imron meneliti tentang collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas belum mampu mencapai tujuan kebijakan. Indikasinya adalah aksesibilitas masyarakat terhadap program yang belum merata serta tata kelola kelembagaan yang belum efektif. Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak. Model yang tepat bagi penguatan kelembagaan program SLBM adalah model sistem kelembagaan yang mampu membangun

administrative network yang sinergis dan luas antar berbagai stakeholders. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan collaborative governance.

Berdasarkan literatur revidu tersebut, maka studi ini akan dilakukan untuk menambah khasanah kajian terkait dengan kolaboratif governance dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konteks penelitian ini adalah peran yang dijalankan oleh para kolaborator (Pemerintah, masyarakat dan swasta) untuk membantu proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0, khususnya di Provinsi DIY. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggambarkan peta aktor/kolaborator yang terlibat dalam proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0 di Provinsi DIY. Lebih lanjut dari aktor governance yang terlibat tersebut dapat dipetakan peran masing-masing aktor/kolaborator dalam proses adaptasi pelaku UMKM menghadapi era revolusi industri 4.0 di Provinsi DIY serta dapat diketahui sejauhmana collaborative governance berdampak pada proses percepatan adaptasi UMKM terhadap revolusi industri 4.0.

Untuk tujuan tersebut, dilakukan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara definisi studi kasus dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi (Salim, 2001). Dalam bukunya yang berjudul Case Study Research: Design and Methods, Yin menyebutkan bahwa studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang menginvestigasi fenomena kontemporer yang ada di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batasan antara fenomena dan konteks yang nyata tersebut belum nyata terbukti dan untuk itu dibutuhkan pembuktian yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber (Yin, 1981). Lebih lanjut dalam penelitian digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu desk study dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada stakeholder yang melakukan kolaborasi untuk mempersiapkan komunitas UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

B. PEMBAHASAN

Collaborative governance dalam konteks pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0 di DIY dianalisis dengan menggunakan konsep *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007: 550-561). Menurut Ansell dan Gash tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Secara lebih detail masing-masing tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Face to face dialogue (dialog tatap muka)

Menurut Ansell and Gash, Collaborative Governance dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (stakeholders). Proses dari Collaborative Governance berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Dalam konteks pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0 di DIY ini, proses dialog tatap muka dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat dan diskusi bersama para stakeholder yang terkait untuk membahas tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh para stakeholder untuk mengembangkan UMKM di era revolusi industri ini. Diantara hasil dari pertemuan dan diskusi tersebut adalah lahirnya rencana-rencana kegiatan dalam bentuk kelas berbagi, pelatihan, diskusi dan seminar yang diselenggarakan secara bersama-sama maupun secara mandiri oleh stakeholder terkait pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM. Stakeholder yang tergabung dalam kerja-kerja kolaboratif ini antara lain; Dinas Koperasi dan UMKM baik di level Provinsi, Kabupaten atau Kota, Dinas Perdagangan Kabupaten, asosiasi-asosiasi pengusaha di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, BUMN yang dalam hal ini direpresentasikan oleh rumah kreatif yang ada di setiap Kabupaten dan Kota serta sejumlah organisasi seperti Gapura Digital (Google), Women Will (Google), Ayo Belajar, Pelatih Indonesia, Sedekah Ilmu, Mata Hati Jogja, Shopee, Tokopedia,

Bukalapak, Belanja.com, HP (Hewlet Packard), Telkom dan beberapa perusahaan atau organisasi yang lain. Adapun topik-topik kelas berbagi, pelatihan, seminar maupun diskusi yang direncanakan akan diselenggarakan oleh stakeholder tersebut antara lain tentang Pelatihan pengembangan bisnis usaha, Pelatihan berniaga secara online, Smartphone Photography + Videography, Pelatihan google friendly, Workshop Digital Marketing di Sosial Media, Pelatihan daer Web, Tips Menyusun Pitchdeck untuk Pengusaha Pemula, Workshop internet marketing, dll.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Berikutnya, setelah proses dialog tatap muka dilakukan, maka komunikasi yang baik diantara kolaborator akan dapat dilakukan. Impactnya kemudian adalah terbangunnya kepercayaan. Poin penting dari mekanisme *collaborative governance* adalah pada aspek ini. Karena kinerja kolaborator menjadi tidak ada artinya tanpa adanya *mutual trust* diantara stakeholder yang berkolaborasi.

Dalam konteks *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di DIY di era revolusi industri 4.0 ini *trust building* ini terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan secara intens melalui diskusi, koordinasi, pelatihan, sosialisasi antara pelaku UMKM sendiri, Pemerintah (dinas-dinas), organisasi swasta (Perusahaan) dan aktor-aktor yang berasal dari masyarakat (asosiasi-asosiasi). *Trust building* ini semakin menguat setelah rencana kegiatan yang dirumuskan oleh para stakeholder dapat direalisasikan dan memberikan dampak yang besar bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pemasaran produknya.

Commitment to the process (komitmen terhadap proses)

Dari beberapa literatur yang menjadi rujukan, diketahui bahwa tingkat komitmen antar stakeholder merupakan penentu dari keberhasilan dan kegagalan Collaborative Governance. Dalam sebuah survey pada American and Australian collaborative groups, Margerum tahun dalam Ansell dan Gash (2007:559) menemukan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar collaborative process. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi bagi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

para aktor untuk mengimplementasikan collaborative governance. Tetapi, menurut Ansell dan Gash, stakeholder tidak ingin kepentingan mereka diabaikan atau hanya sekedar mengamankan posisi mereka. Namun, sebaliknya, sesungguhnya komitmen adalah sebuah keyakinan bahwa dengan collaborative process akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Proses kolaborasi dalam pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0 ini dalam aspek komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu agar pelaku UMKM memperluas jejaring pasarnya dengan memanfaatkan teknologi di era revolusi industri ini dan dapat meningkatkan pendapatannya. Namun, dalam kerjasama antar stakeholder masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, maupun ego sektoral. Dari internal pemerintah, stakeholder yang ada masih fokus pada kepentingannya masing-masing dan belum ada pembagian yang tegas terkait fokus dan lokus kerjanya. Demikian halnya dengan pihak swasta. Namun demikian tetap dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan UMKM di era revolusi industri ini, komitmen dari para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya tetap mengedepankan terwujudnya UMKM di DIY yang unggul dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.

Shared Understanding (saling memahami)

Dalam Collaborative Governance, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang akan mereka capai secara bersama. Konsep ini oleh Ansell dan Gash disebut sebagai shared understanding. Lebih lanjut Shared understanding didefinisikan juga sebagai kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Pemahaman bersama idealnya dimiliki masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama, tidak berjalan semestinya. Shared understanding dalam pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0 di DIY belum optimal. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari banyaknya program yang dilakukan oleh masing-masing

stakeholder yang tumpang tindih dan cenderung kurang sinkron. Stakeholder yang terkait dalam melakukan program maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari stakeholder lain. Bahkan masing – masing stakeholder tidak mengetahui program yang dilakukan oleh stakeholder yang lain dalam pengembangan UMKM di DIY di era revolusi industri 4.0.

Intermediate outcomes (hasil sementara)

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi sangat efektif dilakukan ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret. Meskipun intermediate outcomes dapat mewakili output nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses ini intermediate outcomes diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Keberhasilan kolaboratif governance dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Collaborative governance dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 adalah sebuah strategi yang disepakati bersama untuk meningkatkan daya saing UMKM yang ada di DIY. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari masing-masing stakeholder. Collaborative governance dalam konteks ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah stakeholder diantaranya adalah Dinas Koperasi dan UMKM baik di level Provinsi, Kabupaten atau Kota, Dinas Perdagangan Kabupaten, asosiasi-asosiasi pengusaha di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, BUMN yang dalam hal ini direpresentasikan oleh rumah kreatif yang ada di setiap Kabupaten dan Kota serta sejumlah organisasi seperti Gapura Digital (Google), Women Will (Google), Ayo Belajar, Pelatih Indonesia, Sedekah Ilmu, Mata Hati Jogja, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Belanja.com, HP (Hewlet Packard), Telkom dan beberapa perusahaan atau organisasi yang lain. Collaborative Governance Process dalam

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 belum optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran. Hal ini salah satunya sebagai dampak dari ketiadaan data yang memadai baik yang dikelola oleh masing-masing stakeholder ataupun oleh pemerintah sendiri. Sehingga ada komunitas UMKM yang memperoleh banyak program dan kegiatan dari stakeholder tertentu namun ada pula komunitas sUMKM yang belum tersentuh program dan kegiatan terkait pemanfaatan teknologi.

Penyebab berikutnya dari belum optimalnya collaborative governance ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya forum koordinasi antar stakeholder yang sebagai wadah koordinasi dari masing-masing stakeholder yang memiliki concern yang sama. Dalam hal komitmen, komitmen para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing stakeholder telah secara sadar menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya, tetapi, dalam proses kerjasama antar stakeholder belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembentukan database stakeholder yang menjalankan peran dan fungsi pemberdayaan terhadap UMKM
2. Pendataan terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder untuk kelompok UMKM
3. Pembentukan wadah forum komunikasi dan koordinasi antar stakeholder

REFERENSI

- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Problems of Public Accountability in

Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 147-164.

Gash, C. A. A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18.

Disertasi

Dewi, R. T. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Buku

- Afful-Koomson, T., & Owusu Asubonteng, K. (Eds.). (2015). *Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa*. United Nations University Institute for Natural Resources
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Stake, R.E. (1978). The Case Study Method of Social Inquiry. Dalam *Educational Researcher*. No 7 (2), hal. 5-8
- Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods (Fourth Edition)*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.

Website

- http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/107-ukm?id_skpd=44
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17565/Empat-Strategi-Indonesia-Masuk-Revolusi-Industri-Keempat>
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>